

**Judul** : Selamatkan dokter muda, kebijakan drop out sebaiknya ditunda  
**Tanggal** : Minggu, 21 Juni 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Selamatkan Dokter Muda Kebijakan Drop Out Sebaiknya Ditunda

FOTO: FRANSIS GERINDRA.ID



**Saadiah Uluputty**

KOMISI XIII DPR mendesak penundaan kebijakan *Drop Out* (DO) bagi ratusan dokter muda retaker di seluruh Indonesia demi melindungi hak pendidikan mereka. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya pemutusan studi massal akibat polemik Batas Masa Studi (BMS).

Anggota Komisi XIII DPR Saadiah Uluputty merekomendasikan moratorium kebijakan DO bagi mahasiswa retaker sampai terdapat kepastian hukum yang jelas. Ia menganggap kebijakan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan tentunya konstitusi. Seharusnya, perlindungan HAM kepada para mahasiswa jadi prioritas negara.

Komisi XIII akan mengundang seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknasaintek), Kementerian Kesehatan (Kemkes) hingga organisasi profesi untuk membahas isu ini. "Agar memperoleh gambaran utuh mengenai sengketa tata kelola pendidikan profesi kedokteran," katanya, Jumat (19/6/2026).

Selanjutnya, Saadiah menyoroti urgensi peninjauan kembali aturan perundang-undangan di sektor kesehatan yang memicu ketegangan normatif di lapang-

an. Evaluasi Pasal 213 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan harus didorong agar selaras dengan prinsip hak pendidikan, kepastian hukum, dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagai solusi jangka panjang, Saadiah menawarkan jalan tengah humanis tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat. Usulannya adalah formulasi status hukum baru, yakni Lulus Pendidikan Profesi Dokter Belum Berwenang Praktik, guna memberikan kepastian bagi para dokter muda yang belum lulus uji kompetensi nasional.

Formulasi itu mempertegas posisi Pemerintah dengan dua koridor status berbeda. Pertama, pengakuan akademik bagi yang menyelesaikan kurikulum profesi agar kelulusan tidak hangus. Kedua, pemenuhan sertifikat kompetensi lewat Ujian Kompetensi Nasional Peserta Didik Profesi Dokter tetap jadi syarat mutlak memperoleh registrasi demi aspek keselamatan publik.

Saadiah berharap, kombinasi moratorium kebijakan *drop out*, evaluasi UU, serta penerapan status hukum baru membuat ekosistem pendidikan kedokteran jadi lebih adaptif. "Langkah-langkah itu diharapkan mampu menyelamatkan capaian akademik para dokter muda agar tetap bisa berkontribusi di sektor kesehatan nonklinis," ucap politisi PKS itu.

Senada, anggota Komisi XIII DPR Maruli Siahaan mendesak kebijakan DO massal terhadap mahasiswa retaker profesi dokter dihentikan untuk sementara waktu. Sebagai tindak lanjut, DPR akan mendorong agar audit administratif menyeluruh segera dilaksanakan untuk menyelamatkan nasib serta ruang hidup para dokter muda. ■ PYB